

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Kinerja pengurus barang menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan BMD, baik dari sisi administratif maupun operasional (Kementerian Dalam Negeri, 2021). Meningkatnya kebutuhan akan evaluasi kinerja pengurus barang secara objektif menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menghadirkan sistem yang adil dan terukur.

Pengelolaan BMD yang optimal dapat menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah, memperkuat perekonomian lokal, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, jika pengelolaannya tidak efektif, hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai aset, potensi penyalahgunaan, serta menurunnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nur *et al.*, 2024).

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan alat atau perangkat lunak yang dirancang untuk membantu para pengambil keputusan dalam menganalisis informasi, mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan yang lebih baik. (Handoko, 2022) Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem yang dapat memberikan pemecahan masalah, melakukan komunikasi untuk pemecahan masalah tertentu dengan terstruktur maupun tidak terstruktur. SPK didesain untuk dapat digunakan dan dioperasikan dengan mudah oleh orang yang hanya memiliki kemampuan dasar pengoperasian computer (Umar *et al.*, 2018)

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP), yang memungkinkan penentuan bobot terhadap setiap indikator kinerja secara sistematis dan konsisten. AHP dikenal efektif dalam menangani permasalahan multi-kriteria karena menyediakan kerangka hierarki dan proses perbandingan berpasangan yang logis (Putra & Lestari, 2022). Metode

ini menjadi sangat relevan dalam konteks evaluasi kinerja pengurus BMD karena indikator yang digunakan berasal dari berbagai aspek pengelolaan.

Setelah bobot indikator ditentukan, metode Simple Additive Weighting (SAW) digunakan untuk menghitung skor akhir dan melakukan pemeringkatan terhadap kinerja pengurus barang di setiap SKPD. SAW memiliki kelebihan dalam hal kesederhanaan perhitungan serta fleksibilitas dalam menggabungkan berbagai jenis indikator ke dalam satu nilai akhir (Siregar & Wulandari, 2020). Dengan kombinasi AHP dan SAW, proses penilaian menjadi lebih komprehensif, terukur, dan mudah diterapkan secara berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan data indikator kinerja pengurus barang milik daerah dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk periode 2021 hingga 2023. Data yang dianalisis mencakup lima belas indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai acuan evaluasi, mencerminkan keseluruhan aspek pengelolaan barang mulai dari perencanaan hingga pengawasan (Rahmawati & Nugroho, 2023). Pemanfaatan data historis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja pengurus barang dalam kurun waktu yang konsisten.

Dalam praktiknya, evaluasi terhadap kinerja pengurus barang di lingkungan pemerintah daerah masih bersifat administratif dan belum mengandalkan pendekatan kuantitatif. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam menyajikan penilaian yang mencerminkan capaian riil dari pengelolaan barang milik daerah (Yuliana & Hidayat, 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang mampu mengakomodasi kompleksitas indikator dan bobot kepentingan dalam sistem penilaian yang terstruktur dan transparan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan metode evaluasi kinerja berbasis multi-kriteria serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset. Penerapan metode AHP dan SAW dalam konteks pengelolaan BMD ini juga dapat menjadi model bagi daerah lain yang ingin menerapkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan (Susanti & Firmansyah, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menentukan bobot masing-masing indikator kinerja pengurus barang milik daerah secara objektif dan terukur menggunakan metode AHP?
2. Bagaimana menghitung dan menentukan peringkat kinerja pengurus barang pada SKPD Pemerintah Kabupaten Karawang berdasarkan bobot indikator yang telah ditetapkan dengan metode SAW?
3. Bagaimana implementasi integrasi metode AHP dan SAW dalam membangun sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan penilaian kinerja pengurus barang milik daerah secara kuantitatif dan komprehensif?
4. Apa saja temuan kinerja utama (key performance findings) yang dapat dijadikan dasar rekomendasi perbaikan tata kelola barang milik daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja pengurus Barang Milik Daerah (BMD) yang objektif dan terukur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
2. Melalui integrasi metode AHP dan SAW, penelitian ini menetapkan bobot indikator secara kuantitatif dan melakukan pemeringkatan kinerja SKPD berdasarkan data tahun 2022–2024.
3. Hasil akhir diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih adil, efisien, dan mendukung perbaikan tata kelola aset daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat praktis berupa sistem penilaian kinerja yang terukur bagi pengurus Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Karawang, serta berpotensi menjadi model percontohan bagi daerah lain dengan karakteristik administratif serupa. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan untuk

mendukung alokasi anggaran yang lebih adil, pelaksanaan pelatihan berbasis kebutuhan, serta peningkatan akuntabilitas publik dalam pengelolaan aset daerah. Selain itu, sistem ini mendorong terciptanya transparansi dan objektivitas dalam evaluasi kinerja, sekaligus membuka peluang pengembangan lebih lanjut ke arah sistem digital yang terintegrasi. Berikut ini manfaat penelitian yaitu :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Menyediakan alat bantu pengambilan keputusan yang objektif dalam mengevaluasi kinerja pengurus barang, sehingga mendorong perbaikan tata kelola BMD yang lebih akuntabel, efisien, dan berbasis data

2. Bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan BMD berdasarkan indikator-indikator yang terukur, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Menambah referensi ilmiah terkait penerapan metode AHP dan SAW dalam konteks manajemen aset dan evaluasi kinerja aparatur pemerintahan

4. Bagi Pengembangan Sistem Informasi

Menjadi landasan awal bagi pengembangan sistem evaluasi kinerja BMD yang dapat diotomatisasi melalui platform digital seperti Google Colab atau sistem informasi internal pemerintah daerah.